

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan mengacu pada keadaan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Pengukuran kemiskinan oleh BPS menggunakan konsep kemampuan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang dalam segi ekonomi dalam konteks kebutuhan makanan dan non makanan, pendapatan, dan standar hidup. Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan merujuk pada persentase penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. Sedangkan dalam ranah sosial kemiskinan juga kerap dikaitkan dengan kelas dan stratifikasi sosial. Sehingga menurut Suparmono (2018: 230) mengungkapkan jika kemiskinan itu dapat bersifat multidimensional artinya kemiskinan menyangkut seluruh dimensi kebutuhan manusia yang sifatnya sangat beragam.

2.1.1.1 Ukuran Kemiskinan

Menurut Arsyad (2004: 238) terdapat dua ukuran kemiskinan yang sering digunakan, diantaranya adalah:

1. Kemiskinan Absolut

Konsep kemiskinan absolut biasanya dikaitkan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud didasarkan pada kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan yang diperlukan untuk hidup layak. Apabila tingkat pendapatan yang dihasilkan tidak mampu memenuhi kebutuhan layak yang telah ditetapkan maka digolongkan pada kategori miskin. Dasar rata-rata pengeluaran untuk kebutuhan dasar yang ditetapkan berlaku sama untuk seluruh penduduk. Di Indonesia indikator pengukuran kemiskinan absolut adalah dengan garis kemiskinan. Garis kemiskinan absolut merupakan nominal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi kelompok makanan dan kelompok bukan makanan (Adji et al., 2020). Garis kemiskinan makanan di Indonesia merupakan kebutuhan minimum yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi yang mewakilinya adalah 52 jenis komoditi seperti padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, sayur, susu, buah, dll. Sedangkan garis kemiskinan non makanan merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Berikut perhitungan garis kemiskinan yang digunakan dalam pengukuran kemiskinan absolut:

$$GK = GKM + GKNM$$

Dimana:

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan

Di Indonesia terdapat tiga indeks untuk mengukur kemiskinan diantaranya persentase penduduk miskin (*Head Count Index*-P0), indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1), dan indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2). Penelitian ini penulis menggunakan data persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu merupakan *Head Count Index*-P0.

Rumus perhitungan *Head Count Index*-P0:

$$P_a = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^q \left[\frac{Z - y_i}{Z} \right]^a$$

Dimana:

P_a = Persentase kemiskinan

Z = Garis kemiskinan

q = Jumlah penduduk hidup di bawah garis kemiskinan

N = Jumlah penduduk

2. Kemiskinan Relatif

Menurut Miller (1997) dalam Suparmono (2018:233) menyebutkan bahwa kemiskinan relatif terjadi jika seseorang yang sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, akan tetapi pendapatannya masih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya maka orang tersebut masih digolongkan dalam kategori miskin. Sehingga kemiskinan relatif tidak dipandang dari segi pemenuhan kebutuhan pokok saja melainkan melalui kesenjangan pendapatan juga.

2.1.1.2 Teori Kemiskinan

Terdapat beberapa pendapat mengenai teori kemiskinan sehingga banyak berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan. Penulis merangkum dua teori atau konsep kemiskinan yang dijadikan dasar teori penelitian. Teori ini dapat menjadi penghubung faktor yang mempengaruhi kemiskinan dalam penelitian ini. Teori-teori tersebut antara lain:

1. Teori Kemiskinan Keynes

Teori Keynes (1936) melihat kemiskinan sebagai masalah struktural akibat faktor seperti pengangguran, inflasi, dan ketidakmerataan pendapatan (Faqih et al., 2024). Teori ini juga menekankan bahwa perlu adanya intervensi pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja, dan program kesejahteraan sosial. Modal manusia dianggap penting untuk kemakmuran ekonomi. Dalam mengatasi kemiskinan, pemerintah juga perlu menginvestasikan dalam program-program sosial, seperti pendidikan dan kesehatan, dan mungkin juga perlu memberikan bantuan langsung kepada mereka yang paling miskin (Zaman, 2023). Modal yang disediakan publik (termasuk pendidikan) memiliki peran penting, dengan modal fisik dan manusia diyakini sebagai dasar untuk kemakmuran ekonomi (Simanungkalit, 2023). Perspektif pemikiran neoliberal menggeser pemikiran dengan penekanan lebih besar dari sisi makro dengan orientasi neoklasik yang lebih mikro.

Keynes memandang kemiskinan dari beberapa faktor yaitu: penyediaan modal dan barang publik, pengangguran, dan faktor makroekonomi.

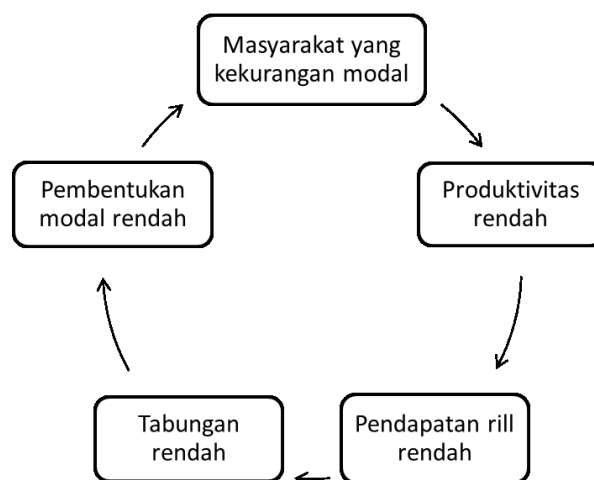
Menurut Sachs (2005) dalam Davis & Sanchez-Martinez (2014) mengungkapkan tanda-tanda utama keterbelakangan di suatu negara atau wilayah meliputi: tingkat sumber daya manusia yang buruk (kesehatan, keterampilan, pendidikan), modal bisnis, infrastruktur (transportasi, listrik, dan sanitasi), modal alam, modal kelembagaan publik, dan modal pengetahuan. Adanya penyediaan barang modal dalam bentuk pendidikan dan infrastruktur dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan produktivitas.

Pengangguran sebagai sumber utama kemiskinan, karena didasarkan pada logika jika individu tidak menerima pendapatan tenaga kerja maka akan mungkin menjadi miskin. Sedangkan faktor makroekonomi yang dapat memicu kemiskinan adalah inflasi, utang negara, dan aset.

2. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Konsep lingkaran kemiskinan atau sering dikenal *vicious circle of poverty* dikenalkan oleh Ragnar Nurkse dalam bukunya yang berjudul “*Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries* (1953).” Dalam Arsyad (2015: 111) mengemukakan jika lingkaran kemiskinan dapat mendefinisikan sebagai suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain sehingga menimbulkan kondisi di mana sebuah kondisi akan tetap miskin. Menurut Nurkse salah satu penyebab timbulnya lingkaran kemiskinan adalah adanya hambatan dalam pembentukan modal. Di satu sisi pembentukan modal dapat dipengaruhi oleh tingkat tabungan, pendapatan, dan pemanfaatan sumber daya. Lingkaran kemiskinan berputar dari minimnya pendapatan yang diakibatkan karena produktivitas yang rendah, mengakibatkan tabungan menjadi rendah sehingga

menghambat pembentukan modal. Pada gilirannya akan mempengaruhi ketertinggalan dalam persaingan pasar. Pendapatan yang rendah pada masyarakat miskin mengakibatkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Akibat pendapatan yang rendah, masyarakat juga tidak memiliki kemampuan untuk menabung sehingga tabungan masyarakat rendah. Hal itu akan berdampak pada ketidakmampuan untuk melakukan pembentukan modal, baik dalam bentuk pendidikan, kesehatan, maupun usaha produktif. Kurangnya modal dalam pendidikan dan kesehatan akan menyebabkan kualitas sumber daya manusia rendah, sehingga produktivitasnya rendah. Produktivitas rendah akan menyebabkan pendapatan yang diterima juga rendah. Siklus itu akan berulang dan sulit untuk keluar dari lingkaran tersebut.



Gambar 2. 1 Lingkaran Setan Kemiskinan

Sumber: Buku Ekonomi Pembangunan. Arsyad (2015)

Lingkaran setan kemiskinan dapat terjadi dari segi permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) (Hermawan & Bahjatulloh, 2022). Dalam sisi permintaan, kemiskinan terjadi karena kurangnya pembentukan modal akibat kurangnya dan

rendahnya partisipasi penanaman modal. Dalam negara yang masih tergolong miskin rangsangan untuk melakukan penanaman modal masih rendah dikarenakan rendahnya daya beli oleh masyarakat (Fahmi & Hayati, 2024). Rendahnya pendapatan yang diterima dapat disebabkan oleh rendahnya produktivitas masyarakat. Sedangkan dari segi penawaran, kemiskinan terjadi karena rendahnya pendapatan masyarakat karena rendahnya produktivitas, sehingga menyebabkan tabungan masyarakat rendah dan menghambat pembentukan modal sehingga menciptakan rendahnya produktivitas yang berulang.

3. Teori Kapabilitas Amartya Sen

Pemenang hadiah nobel bidang ekonomi tahun 1998, Amartya Sen, memiliki pandangan mengenai pembangunan dan kemiskinan dari segi kapabilitas. Dalam Todaro & Smith (2006: 23), Sen memaparkan jika kemiskinan tidak hanya dapat diukur dari tingkat pendapatan atau bahkan utilitas, yang paling penting adalah apakah yang dapat dilakukan oleh seseorang pada barang tersebut sehingga dapat merasakan manfaatnya. Dalam memahami kesejahteraan manusia dan kemiskinan, maka harus berpikir lebih dari hanya ketersediaan komoditi dan memperhatikan kegunaan. Fokus dari kemiskinan bukanlah pada komoditas, tetapi dalam penguatan kapabilitas, yaitu dalam kebebasan nyata bahwa orang benar-benar harus mewujudkan apa yang mereka inginkan (Sen, 1992). Sen menjelaskan bahwa Kapabilitas akan tercipta bila "*Functionings*" (fungsi/potensi) yang ada di setiap individu diberdayakan. "*Functionings*" individu disini sangat luas pengertiannya, salah satunya adalah ketersediaan individu untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, hidup layak, dan kesempatan kerja. Seseorang bisa saja

memiliki pendapatan yang tinggi, namun jika tidak memiliki kebebasan akses terhadap komoditi yang diinginkannya maka kesejahteraan belum terpenuhi. Kemiskinan juga dapat terjadi karena ketiadaan akses yang dapat menunjang pemenuhan kehidupan manusia termasuk keberfungsian hidup layak. Keberfungsian hidup layak yaitu berada dalam keadaan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan yang memadai serta sosial dan ekologis yang nyaman untuk dihuni (Adon et al., 2023). Dalam lingkup negara, pemerintah harus hadir untuk dapat memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Contohnya, pemerintah memberikan fasilitas kehidupan layak bagi penduduk baik dari segi kesehatan, pendidikan dan pemerintah juga harus menyediakan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat dalam mencari penghidupan yang layak (Syawaludin, 2015).

2.1.2 Konsep PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan salah satu variabel makroekonomi yang dapat digunakan dalam indikator pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai proses mendorong peningkatan pendapatan per kapita suatu negara dalam jangka panjang menjadi penting dan harus dicapai. PDRB per kapita atau pendapatan per kapita Menurut Sukirno (2015: 424) mengatakan bahwa pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara atau daerah pada suatu periode tertentu yang biasanya satu tahun. Sehingga pendapatan per kapita dapat didefinisikan sebagai rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk di suatu wilayah dalam satu tahun. Menurut BPS terdapat dua ukuran PDRB per kapita yaitu PDRB per kapita atas harga berlaku dan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan. PDRB per kapita

atas dasar harga berlaku adalah nilai PDRB per satu orang penduduk pada harga tahun berjalan. Sedangkan PDRB per kapita harga konstan adalah perhitungan pendapatan per kapita yang didasarkan pada tahun tertentu yang menjadi tahun dasar sehingga dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi per kapita penduduk. PDRB per kapita atas harga berlaku dapat dapat mencerminkan secara kasar pendapatan setiap penduduk di suatu wilayah (Mardiana et al., 2024). Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah maka mencerminkan semakin tinggi pula pendapatan masyarakatnya. Semakin tinggi pendapatan per kapita, kemakmuran masyarakat dianggap semakin tinggi (Suparmono, 2018: 31).

2.1.2.1 Pengukuran PDRB Per Kapita

PDRB per kapita dapat dihitung dengan dengan membagi Produk Domestik Bruto (PDRB) wilayah dengan jumlah penduduk di wilayah. Berikut adalah formula untuk menghitung PDRB per kapita:

$$PDRB \text{ Per Kapita} = \frac{PDRB}{Jumlah \text{ Penduduk}}$$

PDRB akan mencerminkan nilai pendapatan yang diterima oleh satu individu di suatu wilayah. PDRB per kapita dapat menjadi indikator kesejahteraan. Jika angka per kapita tinggi maka dapat menunjukkan pendapatan yang lebih tinggi dan akses yang lebih baik terhadap barang dan jasa. Pendapatan perkapita yang relatif meningkat dalam jangka panjang, artinya perekonomian dianggap mengalami perkembangan (Amalia et al., 2022: 4). PDRB per kapita juga dapat menjadi perbandingan antar daerah. Dengan menggunakan tolak ukur pendapatan per kapita dapat membandingkan tingkat kesejahteraan antar daerah.

2.1.2.2 Teori PDRB Per Kapita

Terdapat konsep pemikiran yang menggambarkan PDRB per kapita atau pendapatan perkapita, yaitu teori Konvergensi Pendapatan yang didasarkan pada hipotesis Barro dan Sala'i Martin dengan menggunakan model pertumbuhan neoklasik. Barro dan Sala'i Martin (1996) dalam Tajerin et al., (2017) menjelaskan konsep konvergensi dalam ekonomi adalah suatu tingkat pendapatan perkapita yang lebih rendah tetapi bisa mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih cepat pada masa selanjutnya. Teori ini dapat dipahami sebagai proses pengejaran ketertinggalan daerah dengan penghasilan rendah terhadap daerah yang berpenghasilan tinggi yang dihitung berdasarkan pendapatan per kapita. Pada teori ini berasumsi daerah yang telah maju akan mengalami stagnasi karena tambahan investasi tidak menambah pendapatan, sementara daerah yang pendapatannya lebih rendah yang memiliki investasi dapat terus menambah pendapatan dan mengejar ketertinggalan. Konvergensi absolut menjelaskan bagaimana perekonomian daerah miskin memiliki kecenderungan untuk tumbuh lebih cepat dari daerah kaya dengan melihat PDRB riil per kapita (Chatarina Anggri Ayu Yulisningrum & AM. Rini Setyastuti, 2013). Alasan terjadinya konvergensi adalah perbedaan rasio modal dengan tenaga kerja dan perbedaan teknologi. Daerah yang kaya akan memiliki rasio modal terhadap tenaga kerja yang lebih besar sehingga return on capitalnya rendah dan sebaliknya di negara miskin, sehingga banyak aliran modal dari wilayah kaya ke wilayah miskin. Proses konvergensi akan tercapai apabila terjadi peningkatan pendapatan per kapita,

sehingga pada gilirannya akan mencapai pembangunan ekonomi pada daerah miskin.

2.1.3 Konsep Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran adalah statistik yang mengukur persentase orang-orang yang ingin bekerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan (Mankiw, 2007: 34). Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang memiliki dampak pada sosial ekonomi. Pengangguran akan menghilangkan pendapatan utama seseorang dan akan mengurangi kesejahteraan hidup. Menurut BPS tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Tingginya angka pengangguran dapat menjadi ancaman bagi perekonomian negara. Karena ketika angka pengangguran tinggi maka menggambarkan banyak penduduk yang telah memasuki usia produktif namun tidak memiliki pekerjaan sebagai salah satu sumber pendapatannya. Tingkat pengangguran terbuka dapat digunakan untuk melihat besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Menurut Sukirno (2015), Pengangguran dapat dibedakan menjadi beberapa jenis

- a) Berdasarkan penyebabnya pengangguran dapat dibedakan menjadi empat jenis, diantaranya:

1. Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional merupakan pengangguran yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan calon pekerja untuk mencari kerja. Salah satu alasan dari pengangguran yaitu membutuhkan waktu lama dalam pencarian kerja dan mencocokkan pekerjaan dengan pekerja. Dalam hal ini penyebab pengangguran juga dapat dilihat dari kesulitan yang berbentuk seperti prosedur pelamaran dan seleksi akibat adanya jarak dan minimnya informasi. Pengangguran ini bisa terjadi sementara karena pekerja menginginkan pekerjaan yang lebih layak.

2. Pengangguran Siklikal

Pengangguran siklikal dapat terjadi karena adanya penurunan permintaan agregat yang dapat diakibatkan oleh kemerosotan harga komoditas tertentu, sehingga berdampak pada penurunan produksi di perusahaan yang pada gilirannya akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Tenaga kerja yang terkena dampak pengurangan dapat mengalami pemberhentian kerja dan menjadi pengangguran.

3. Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural merupakan pengangguran yang disebabkan karena struktur ekonomi yang mengalami perubahan. Perubahan-perubahan kondisi ekonomi dapat menggeser aktivitas ekonomi dan menyebabkan adanya persaingan lebih serius baik dari segi barang dan jasa yang diproduksi. atau segi keterampilan tenaga kerja Seringkali kondisi tenaga kerja yang tidak dapat mengikuti perubahan aktivitas ekonomi dengan perubahan keterampilan

yang dimiliki. Sehingga sulit untuk masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Adanya perubahan ekonomi jika tidak diiringi dengan inovasi maka perusahaan akan mengalami kemerosotan karena tidak dapat mengikuti arus. Hal tersebut berdampak pada permintaan tenaga kerja sehingga menimbulkan pengangguran.

4. Pengangguran Teknologi

Pengangguran teknologi terjadi akibat adanya pergantian tenaga kerja manusia oleh tenaga mesin-mesin dan bahan kimia. Beberapa pabrik yang menggunakan robot akan mengurangi permintaan tenaga kerja manusia. Sehingga kondisi yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi untuk menggantikan tenaga manusia dinamakan pengangguran teknologi.

b) Berdasarkan ciri pengangguran yang berlaku terdapat empat jenis, diantaranya yaitu:

1. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka merupakan wujud pengangguran akibat lowongan pekerjaan yang lebih rendah dibandingkan dengan penambahan angkatan kerja atau tenaga kerja. Efek tersebut akan menyebabkan seseorang akan lama untuk tidak bekerja. Sehingga kelompok ini akan menganggur secara nyata dan sepenuh waktu.

2. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran tersembunyi merujuk pada kondisi dimana jumlah tenaga kerja lebih banyak dari yang seharusnya diperlukan. Kelebihan

tenaga kerja tersebut menyebabkan sebagian tenaga kerja yang dipekerjakan ada yang bekerja dan ada yang tidak bekerja. Seseorang mungkin saja akan bekerja jika ada kesempatan kondisi tersebut dinamakan pengangguran tersembunyi.

3. Pengangguran Bermusim

Pengangguran bermusim adalah kondisi tenaga kerja yang menganggur atau tidak bekerja hanya pada waktu tertentu atau musim tertentu. Pengangguran ini biasa terjadi di sektor pertanian atau perikanan yang hanya memerlukan tenaga kerja di saat musim panen.

4. Setengah Menganggur

Setengah menganggur merujuk pada tenaga kerja yang bekerja namun jam kerjanya lebih rendah daripada jam kerja normal. Pekerja ini memiliki masa kerja yang lebih singkat. Maka kondisi tersebut dinamakan setengah menganggur.

2.1.3.1 Teori Pengangguran

Teori yang menjelaskan mengenai pengangguran diantaranya:

1. Teori Klasik

Teori klasik mengemukakan jika pengangguran dapat dihindari melalui regulasi penawaran dan mekanisme penentuan harga di pasar bebas. Tingkat pengangguran bukan ukuran yang baik tentang apakah pasar tenaga kerja berjalan dengan baik atau tidak. Tingkat pengangguran berfluktuasi karena kondisi ekonomi yang berfluktuasi (Case & Fair, 2001: 229). Orang yang menganggur memilih tidak bekerja dengan upah yang berlaku saat itu,

karena mereka sedang berpindah pekerjaan. Pada kondisi ini upah dianggap sepenuhnya fleksibel. Pada kondisi penawaran tenaga kerja lebih banyak maka upah akan turun dan tingkat pengangguran akan meningkat. Kondisi tersebut akan berdampak pada sosial ekonomi masyarakat. Pengangguran yang tinggi dapat memperburuk distribusi pendapatan karena mengurangi daya beli masyarakat, sehingga masyarakat dapat masuk kedalam jurang kemiskinan.

2. Teori Keynes

Teori pengangguran oleh Keynes menyatakan bahwa tingkat produksi dan kesempatan kerja dipengaruhi oleh permintaan agregat. Jika terjadi penurunan pada permintaan agregat maka perusahaan akan menurunkan produksi dan pada gilirannya akan menyebabkan pengangguran. Pandangan keynes terhadap pengangguran, diperlukan peran pemerintah untuk meningkatkan permintaan agregat dan memperbaiki mekanisme pasar. Sehingga pada kondisi ini pengangguran lebih diakibatkan karena adanya pengangguran siklis, kurangnya permintaan sehingga produksi menurun dan tenaga kerja yang dibutuhkan akan menurun. Kondisi tersebut akan meningkatkan seseorang kehilangan pekerjaan dan tingkat pengangguran meningkat. Pengangguran yang tinggi akan menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya akan mengurangi konsumsi dan investasi. Jika terjadi secara berkurang dan terus menerus akan menjadi lingkaran setan kemiskinan.

2.1.4 Konsep Akses Sanitasi Layak

Menurut BPS, indikator sanitasi layak dilihat dari persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak. Rumah tangga yang memiliki sanitasi layak apabila memiliki fasilitas tempat BAB sendiri, bersama dengan ART (anggota rumah tangga) dari rumah tangga tertentu, atau komunal dengan kloset leher angsa dan TPAT berupa tangki septik atau IPAL. Termasuk juga memiliki akses terhadap sanitasi layak jika di pedesaan menggunakan fasilitas buang air besar sendiri atau bersama rumah tangga lain dengan jenis kloset leher angsa namun TPATnya menggunakan lubang tanah (Bappenas, 2021). Pemenuhan akses sanitasi layak juga termasuk pada indikator SDGs. WHO (2018) mengatakan air dan sanitasi yang buruk yang terkontaminasi dengan kotoran manusia ditambah rendahnya kesadaran kebersihan merupakan penyebab diare, disentri, hepatitis, tifus, dan penyakit lainnya. Pentingnya ancaman tidak tersedianya akses sanitasi dan air yang layak sama seperti ancaman emisi polusi yang dapat mengancam kesehatan masyarakat sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi produktivitas dan perekonomian. Tidak dapat diaksesnya sanitasi dan air bersih terutama dapat mempengaruhi orang miskin dan diyakini dapat berpotensi untuk menyebabkan penyakit menular (Todaro & Smith, 2020: 503). Berdasarkan teori lingkungan kuznets menyatakan ketika pendapatan masyarakat meningkat, masyarakat akan memiliki sarana dan kemauan untuk membayar kepedulian lingkungan. Masalah-masalah lingkungan yang juga menjadi pemenuhan kebutuhan standar kehidupan layak seperti sanitasi dan air bersih mulai membaik jika pendapatan meningkat.

2.1.4.1 Teori Akses Sanitasi Layak

Modal manusia atau *human capital* merupakan istilah yang mengacu jika terjadi peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia maka akan meningkatkan produktivitas manusia. Teori *human capital* diperkenalkan oleh Theodore W. Schultz pada tahun 1961. Dalam teori *human capital* menekankan bahwa pendidikan, pengetahuan, kesehatan, serta keterampilan merupakan modal manusia. Peningkatan modal manusia mendukung peningkatan produktivitas dan potensi pendapatan di masa depan. Dengan begitu diharapkan kualitas modal manusia meningkat sehingga menjadi faktor yang membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Human capital merupakan sebuah investasi yang dilakukan manusia untuk meningkatkan produktivitasnya (Rosen, 1999). Menurut Goldin (2016) peningkatan sumber daya manusia dalam kesehatan akan memungkinkan seseorang lebih produktif hingga menyebabkan peningkatan pendapatan.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ngubane et al., (2023) <i>Economic Growth, Unemployment and Poverty: Linear and on-linear evidence from South Africa</i>	- Tingkat Kemiskinan - Tingkat Pengangguran	- Kemiskinan Pangan - Kemiskinan batas atas dan batas bawah - Pertumbuhan Ekonomi	Pengangguran memperkuat kemiskinan dalam jangka panjang, sementara Pertumbuhan Ekonomi mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang.	Heliyon, Vol. 9, Issue 10, e20267 (2023) Elsevier BV
2.	Saadaoui Mallek et al., (2024) <i>Infrastructure Development</i>	- Tingkat Kemiskinan - Infrastruktur Akses Sanitasi Layak	- Pendidikan Ketimpangan Pendapatan - Urbanisasi Kualitas	Pembangunan infrastruktur mengurangi tingkat kemiskinan di	Cities Vol. 144 Article 104658, (2024) Elsevier BV

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>and Poverty Eradication in sub-Saharan Africa; Its effect and transmission channels</i>	- Tingkat Pengangguran	Lingkungan	wilayah SSA berdasarkan regresi efek langsung. Efek tidak langsungnya adalah indeks transportasi, listrik, TIK, dan air dan sanitasi berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di negara wilayah SSA.	
3.	Iffah et al., (2023) <i>Poverty Modeling in Indonesia: A Spatial Regression Analysis</i>	- Tingkat Kemiskinan - Akses Sanitasi Layak	- PDRB - Angka Harapan Sekolah - Akses Listrik	PDRB, Akses Listrik memiliki hubungan negatif, Angka harapan Sekolah memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan, sedangkan Akses Sanitasi Layak memiliki hubungan negatif tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.	Economics Development Analysis Journal Vol. 12 No. 4 (2023) ISSN 2252-6560 Universitas Negeri Semarang
4.	Rahman et al., (2021) <i>Analysis of Factors Affecting Poverty in the North Sumatra Province</i>	- Tingkat Kemiskinan - PDRB Per Kapita - Tingkat Pengangguran Terbuka	- Rata-rata Lama Sekolah	PDRB Per Kapita dan Rata-Rata Lama Sekolah memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki hubungan negatif dan tidak	Economics Development Analysis Journal Vol. 10 No. 2 (2021) ISSN 2252-6560 Universitas Negeri Semarang

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara	
5.	Suci et al., (2023) <i>The Effect of Economic Growth, Education, Unemployment, and Human Development Index on Poverty in the Special Region of Yogyakarta for Period 2015-2021</i>	- Tingkat Kemiskinan - Tingkat Pengangguran	- Pendidikan - PDRB - IPM	Pengangguran memiliki hubungan positif, PDRB, Pendidikan memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh, sedangkan IPM memiliki hubungan negatif berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Yogyakarta.	JIET (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan) Vol. 8 No. 2 (2023): 284-296 p-ISSN 2541-1470, e-ISSN 2528-1879 Universitas Airlangga
6.	Fajriah (2021) <i>Analysis of The Effect of Gross Regional Domestic Product, number of Population, Regional Minimum Wage, Open Unemployment Rate, and Human Development Index on Poverty in 2010-2020 East Java Province</i>	- Tingkat Kemiskinan - Tingkat Pengangguran Terbuka	- PDRB - IPM - Jumlah Penduduk - Upah Minimum Regional	Pengangguran memiliki hubungan positif, PDRB, Jumlah Penduduk, dan IPM memiliki hubungan negatif berpengaruh signifikan, sedangkan UMR memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Jawa Timur	JIET (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan) Vol. 6 No. 2 (2021): 171-187 p-ISSN 2541-1470, e-ISSN: 2528-1879 Universitas Airlangga
7.	Andrean et al., (2023) <i>Determinant on of Poverty Through</i>	- Tingkat Kemiskinan - Tingkat Pengangguran Terbuka	- PDRB - IPM - Investasi	Pengangguran memiliki hubungan positif tidak berpengaruh signifikan,	Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) Vol. 6 No. 2 Jul 2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Unemployment in North Sumatra</i>			PDRB, investasi, dan IPM memiliki hubungan positif berpengaruh signifikan, terhadap kemiskinan di Sumatra Utara.	Page: 1289-1318 e-ISSN: 2621-606X Sharia Economics Department Universitas KH. Abdul Chalim, Mojokerto
8.	Sembiring et al., (2020) Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Pengangguran Terbuka, dan Angkatan Kerja terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara	- Tingkat Kemiskinan - Tingkat Pengangguran Terbuka	- Pertumbuhan Ekonomi - IPM - Angkatan Kerja	Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki hubungan positif berpengaruh signifikan. Sedangkan IPM dan Angkatan Kerja memiliki hubungan positif tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara.	Journal Serambi Engineering (JSE), Vol. 5 No. 2, April 2020 Hal 974-984. p-ISSN: 2528-3561 e-ISSN: 2541-1934 Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh
9.	Sinaga et al., (2023) Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Per Kapita, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kepulauan Nias	- Tingkat Kemiskinan - Pendapatan Per Kapita - Tingkat Pengangguran Terbuka	- Pendidikan	Pendapatan Per Kapita memiliki hubungan negatif, Tingkat Pengangguran memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan, sedangkan Pendidikan memiliki hubungan negatif tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kepulauan Nias.	EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 5 No. 1 Mei 2023, e-ISSN: 2614-7181 Universitas Simalungan
10.	Tubaka (2019) Analisis Kemiskinan di	- Tingkat Kemiskinan - Tingkat	- Pertumbuhan Ekonomi - Pendidikan	Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan	Citra Ekonomika Jurnal Ilmu Ekonomi Vol.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kawasan Timur Indonesia	Pengangguran Terbuka	- Distribusi Pendapatan - Kesehatan	Ekonomi, Distribusi Pendapatan, dan Kesehatan memiliki hubungan positif dan tidak berpengaruh signifikan. Sedangkan Pendidikan memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan pada kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia.	XIII, No. 1 Desember 2019, ISSN 1978-3612 Universitas Pattimura
11.	Manalu et al., (2023) Analisis Pengaruh Laju Pertumbuhan PDRB, PDRB Per Kapita, dan Gini Rasio terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2022	- Tingkat Kemiskinan - PDRB Per Kapita	- Laju Pertumbuhan PDRB - Gini Ratio	PDRB Per Kapita memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan, Laju Pertumbuhan PDRB memiliki hubungan negatif, Gini Rasio memiliki hubungan positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.	Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol. 4 No. 2 Bulan Oktober 2023-Maret 2024 E-ISSN 2723-6951 Universitas Tjut Nyak Dhien
12.	A. Fitriana & Gravitiani (2022) Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Per Kapita, dan Akses Sanitasi Layak terhadap Kemiskinan	- Tingkat Kemiskinan - PDRB Per Kapita - Akses Sanitasi Layak	- IPM - Desentralisasi Fiskal	Desentralisasi Fiskal memiliki hubungan positif, IPM dan Pendapatan Per Kapita memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan, sedangkan Akses Sanitasi Layak memiliki hubungan negatif tidak berpengaruh signifikan	Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol. 22 No.1, Maret, 2022, Page 44-56 P-ISSN 1412-2200 E-ISSN 2548-1851 Universitas Sebelas Maret

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				terhadap Kemiskinan	
13.	Yustie (2020) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di 9 (Sembilan) Kota di Provinsi Jawa Timur	- Tingkat Kemiskinan - Tingkat Pengangguran Terbuka	- IPM - Rasio Ketergantungan	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rasio Ketergantungan memiliki hubungan positif, sedangkan IPM memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di 9 (Sembilan) Kota di Provinsi Jawa Timur.	OECONOMICUS Journal of Economics Vol. 5, No. 1, December 2020 Print ISSN: 2548-6004; Online ISSN: 2715-4882 Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya
14.	Adhitya et al., (2022) Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi, dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Per Rumah Tangga terhadap Kemiskinan di Indonesia	- Tingkat Kemiskinan - Akses Sanitasi Layak	- Pendidikan - Kesehatan - Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga Per Rumah Tangga	Pendidikan, Kesehatan, dan Akses Sanitasi Layak memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan. Sedangkan Rata-Rata Jumlah Anggota Rumah Tangga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan Indonesia.	Ekonomis: Journal of Economics and Business, Vol 6, No. 1, Maret 2022, 288-295, ISSN 2597-8829 (online), Universitas Batanghari Jambi
15.	Ipmawan et al., (2022) <i>The Influence of The Human Development Index, Unemployment Rate, and Illiteracy Population on Poverty Level in Indonesia for the Period</i>	- Tingkat Kemiskinan - Tingkat Pengangguran Terbuka	- IPM - Jumlah Penduduk - Angka Melek Huruf	Tingkat Pengangguran dan Angka Melek Huruf berpengaruh signifikan, sedangkan IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.	Muharrrik: Jurnal Dakwah dan Sosial – Vol.4, No.01, (2021), pp.89-104, P-ISSN: 2655-3694, E-ISSN: 2655-3686 Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2015-2020				
16.	Daniel et al., (2023) <i>The Effect of Economic Growth, Open Unemployment Rate and Human Development Index on Poverty in North Sumatra</i>	- Tingkat Kemiskinan - Tingkat Pengangguran Terbuka	- LPE - IPM	Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki hubungan positif tidak berpengaruh signifikan, sedangkan LPE memiliki hubungan positif, IPM memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara	Indonesia Journal of Advanced Research (IJAR), Vol. 2, No. 5, 2023: 391-402 E-ISSN: 2986-0768 Formosa Publisher
17.	R. I. Fitriana & Hasmarini (2022) <i>Determinants of Poverty Rate in East Jawa Province in 2018-2020</i>	- Tingkat Kemiskinan - PDRB Per Kapita Tingkat Pengangguran Terbuka	- PDRB - Jumlah Penduduk	Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki hubungan positif, PDRB memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan, sedangkan Pendapatan Per Kapita memiliki hubungan negatif, Jumlah Penduduk memiliki hubungan positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.	JRSSEM: Journal Research of Sosial Science, Economics, and Management Vol. 02 No.4 (2022), 533-543 E-ISSN: 2807-6311, P-ISSN: 2807-6494 Parthenope University of Naples, Italy
18.	Andrianus & Alfatih (2023) <i>Pengaruh Infrastruktur</i>	- Tingkat Kemiskinan - Akses Sanitasi Layak	- Panjang Jalan Dan Luas Wilayah - Akses Listrik	Akses Sanitasi dan Akses Listrik memiliki hubungan	Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis, Vol. 5, No. 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	terhadap Kemiskinan dengan Menggunakan Data Panel 34 Provinsi di Indonesia			negatif dan berpengaruh signifikan, sedangkan Akses Jalan memiliki hubungan negatif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 34 Provinsi Indonesia.	(2023), 56-62. e-ISSN: 2714-8491.
19.	Azizah et al., (2022) Sanitasi dan Kepadatan Penduduk Sebagai Dinamika Kemiskinan Kota: Studi Kasus Provinsi Jawa Barat	- Tingkat Kemiskinan - Akses Sanitasi Layak	- Kepadatan Penduduk	Akses Sanitasi Layak dan Kepadatan Penduduk memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di wilayah perkotaan Provinsi Jawa Barat.	Jurnal Nuansa Akademik, Vol.7, No. 1, Juni (2022), 55-70. ISSN: 1858-2826, e-ISSN: 2747-0954. Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
20.	Budiono & Purba (2022) <i>Reducing Poverty Strategy Through Educational Participation, Clean Water, and Sanitation in Indonesia</i>	- Tingkat Kemiskinan - Akses Sanitasi Layak	- Partisipasi Sekolah - Akses Air Bersih	Akses Sanitasi Layak, Akses Air Bersih, dan Partisipasi Sekolah memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.	JEB: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 25, No. 1, April (2022), 177-198. ISSN: 1979-6471 E-ISSN: 2528-0147. Universitas Kristen Satya Wacana Indonesia

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan PDRB Per Kapita dengan Tingkat Kemiskinan

PDRB Per Kapita atau pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara dalam satu tahun. Secara singkat pendapatan per

kapita dapat mencerminkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan penduduk. Kemiskinan kerap kali dikaitkan dengan kekurangan pendapatan. Dalam teori lingkaran kemiskinan, siklus kemiskinan dapat disebabkan karena pendapatan yang rendah sehingga akan mengakibatkan seseorang tidak memiliki akses dalam pembentukan modal dan pada akhirnya akan menyebabkan seseorang tetap dalam lingkaran kemiskinan karena memiliki produktivitas yang rendah. Penduduk dikategorikan miskin jika tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Besar kecilnya pendapatan penduduk akan mempengaruhi kesejahteraan hidupnya karena pendapatan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Ketika pendapatan per kapita mengalami peningkatan artinya rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk meningkat. Meningkatnya pendapatan dapat menambah kesejahteraan, karena penduduk dapat menggunakan pendapatannya dalam memenuhi berbagai kebutuhannya sehingga pada gilirannya akan membantu penduduk keluar dari kemiskinan. Namun jika pendapatan per kapita mengalami penurunan maka akan terjadi penurunan aktivitas ekonomi karena secara rata-rata pendapatan penduduk mengalami penurunan. Sehingga penduduk tidak dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Jika kondisi tersebut terjadi terus menerus maka akan menyebabkan penduduk masuk ke dalam kemiskinan. Sehingga PDRB Per Kapita memiliki hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hal itu didukung oleh berbagai hasil penelitian terdahulu oleh (Christiani & Nainupu, 2021; A. Fitriana & Gravitiani, 2022; R. I. Fitriana & Hasmarini, 2022; Manalu et al., 2023; Rahman et al., 2021; Sinaga et al., 2023).

2.2.2 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Tingkat Kemiskinan

Kondisi pengangguran atau seseorang yang menganggur akan menghilangkan pendapatan utama sehingga berpengaruh pada kesejahteraan hidupnya. Ketika pendapatan seseorang berkurang karena menganggur, maka tingkat kemakmuran yang ingin dicapai akan berkurang (Nabibah & Hanifa, 2022). Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan ataupun ketika pengeluaran pokoknya di bawah garis kemiskinan akan menjadikannya masuk dalam kategori miskin dan memungkinkan akan meningkatkan angka kemiskinan. Berdasarkan pandangan Keynes pengangguran terjadi karena adanya penurunan permintaan agregat dan hal itu akan meningkatkan pengangguran sehingga kemiskinan juga meningkat. Penurunan pendapatan akan memaksa seseorang mengurangi pengeluaran termasuk pendidikan dan kesehatan. Sejalan dengan teori lingkaran setan kemiskinan, kemiskinan akan terus terjadi jika pembentukan modal rendah dan produktivitas masyarakat masih rendah.

Sehingga pengangguran memiliki hubungan positif terhadap kemiskinan. Jika angka pengangguran naik maka dapat mencerminkan semakin banyak orang yang tidak memiliki pendapatan karena tidak bekerja. Hal itu yang akan menjadikan seseorang sulit memenuhi kebutuhan hidup dan masuk ke dalam jurang kemiskinan. Pada akhirnya pengangguran yang tinggi akan meningkatkan tingkat kemiskinan. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang juga menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh positif pada tingkat

kemiskinan (Daniel et al., 2023; Fajriah, 2021; R. I. Fitriana & Hasmarini, 2022; Sinaga et al., 2023; Tubaka, 2019; Yustie, 2020)

2.2.3 Hubungan Akses Sanitasi dengan Tingkat Kemiskinan

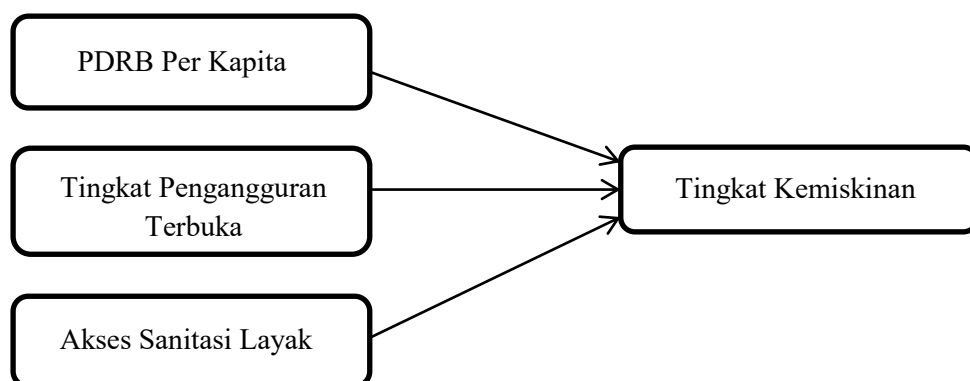
Kemiskinan kerap dipandang sebagai multidimensional. Selain dari segi ekonomi, kemiskinan juga berkaitan dengan pemenuhan standar hidup dan kesehatan. Akses sanitasi layak merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang perlu dipenuhi. Adanya akses sanitasi merupakan pemenuhan dari segi standar hidup layak manusia. Kemiskinan juga terjadi apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sumber daya layak atau standar hidup yang layak. Sehingga penduduk yang memiliki keterbatasan akses pada standar hidup layak akan dikategorikan pada penduduk miskin.

Di sisi lain, akses sanitasi layak juga dapat berkaitan dengan kesehatan. Ketika penduduk tidak dapat memiliki akses yang dapat memberi jaminan layak dan kesehatan maka akan berakibat pada lingkungan yang tidak sehat sehingga menimbulkan berbagai risiko kesehatan. Pada gilirannya akan berpengaruh pada tingkat produktivitas dan kesejahteraan mereka. Terjangkitnya penyakit akan menimbulkan biaya kesehatan bagi penduduk miskin sehingga mereka akan semakin sulit keluar dari jerat kemiskinan. Ancaman kesehatan akibat kurangnya sanitasi juga akan berdampak pada produktivitas sehingga berdampak negatif pada pendapatan keluarga. Sehingga, teori *human capital* dapat menjadi landasan teori antara hubungan akses sanitasi layak dengan kemiskinan. Akses sanitasi layak dapat mendukung peningkatan kesehatan masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan potensi pendapatan di masa depan. Dengan

meningkatnya akses sanitasi setiap rumah tangga maka diharapkan kualitas modal manusia meningkat sehingga menjadi faktor yang membantu masyarakat keluar dari kemiskinan.

Manusia perlu memenuhi kebutuhannya dari berbagai aspek yaitu ekonomi, pendidikan, juga kesehatan. Standar hidup layak terutama akses sanitasi juga merupakan salah satu jembatan seseorang untuk mencapai kesejahteraan hidup. Akses sanitasi layak akan memperbaiki kesehatan masyarakat, meningkatkan produktivitas dan membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan standar hidup yang layak dalam mencapai kesejahteraan. Ketika kesejahteraan hidup penduduk terpenuhi maka akan mengurangi kemiskinan. Berdasarkan pemikiran penulis, maka Akses Sanitasi Layak memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan. Hal itu juga didukung dengan hasil berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan adanya hubungan negatif akses sanitasi terhadap kemiskinan (Adhitya et al., 2022; Andrianus & Alfatih, 2023; Azizah et al., 2022; Budiono & Purba, 2022; A. Fitriana & Gravitiani, 2022).

Berdasarkan uraian dan tinjauan pustaka di atas maka kerangka pemikiran penulis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

1. Diduga secara parsial variabel PDRB Per Kapita dan Akses Sanitasi Layak berpengaruh negatif, sedangkan variabel Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan di sembilan provinsi Kawasan Timur Indonesia tahun 2018-2023.
2. Diduga secara bersama-sama PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Akses Sanitasi berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di sembilan provinsi Kawasan Timur Indonesia tahun 2018-2023.